

KONFLIK SOSIAL DI KAMPUNG NELAYAN
Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat

SOCIAL CONFLICT INFISHERMAN VILLAGE
The Case Study on the North Beach Cirebon City, West Java

Soni A. Nulhaqim dan Maulana Irfan

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Jatinangor Sumedang KM 21 Telp. 022-7796416

E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

Diana Hardhing

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

E-mail: dhard_harding@yahoo.com

Dyana C. Jatnika

Pusat Studi konflik dan Resolusi konflik

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: dyanacjatnika@gmail.com

Diterima: 16 April 2017, Direvisi: 25 Juli 2017, Disetujui: 2 Agustus.2017

Abstrak

Penelitian ini mengangkat dari sudut pandang pelaku untuk memahami peristiwa konflik dan dimensinya serta resolusinya yang lebih efektif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan teknik studi kasus. Informan penelitian adalah pelaku konflik, baik dari kalangan nelayan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi nonpartisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini, mendeskripsikan tentang peristiwa konflik meliputi pemicu konflik, penyebab konflik, dampak konflik, serta resolusi konflik. Pemicu konflik antar kelompok tersebut memiliki kesamaan yaitu dipicu oleh perbuatan yang sepele seperti suara knalpot motor, rasa cemburu, dan gesekan antar perahu. Begitupun dengan penyebab konfliknya yaitu perlakuan yang tidak adil dan persaingan sumber daya ekonomi. Dampak konflik meliputi adanya korban luka dan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan bangunan, maupun terjadinya perpecahan antar anggota masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat. Resolusi konflik yang dilakukan melalui pendekatan keamanan, negosiasi dan mediasi. Rekomendasi hasil Penelitian adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam resolusi konflik serta pemberdayaan nelayan dan institusi nelayan.

Kata Kunci: konflik sosial, nelayan, resolusi konflik.

Abstract

This research would like to highlight from the perspective of suspects to understand its event, dimensions, and effective resolution. This research is descriptive type and case study technique. The informants of this research are suspects to conflict from fisherman and community. The result of research describes the event of conflict such as conflict trigger, causes, impact, and its resolution. The conflicts among fisherman and non-fisherman was triggered by trivial causes such a sound of motor exhaust, jealousy, and small crashes of boat. The same happens with conflict causes such as unfair treatment and competition of economic resource. The effects of conflict are casualties, environmental and building damage, disunity of society and distrust to local government. Resolution of conflict was executed through security approach, negotiation, and mediation. The recommendations of this research are increase the capacity of local government, local security, and public figure within conflict resolution along with empowering of fisherman and their institution.

Keywords: social conflict, fisherman, conflict resolution.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat (Nasikun, 2001). Namun demikian apabila konflik tersebut dibiarkan dan tidak dikelola dengan seksama, maka yang terjadi adalah kerugian bagi kehidupan masyarakat, karena akan menimbulkan banyak korban baik harta ataunyawa serta tata kehidupan sosial yang tidak aman dan tidak sehat.

Atas dasar pemahaman mengenai konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam penanganan konflik memerlukan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini akan mencegah munculnya pola-pola penanganan yang justru akan mengaburkan pokok permasalahan.

Penelitian tentang konflik di pantai Utara Jawa Barat terjadi berkaitan dengan berbagai aspek yaitu adanya benturan nilai, ide atau ideologis dan agama; adanya perbedaan kepentingan yang diusung oleh para pesaing kekuasaan dan adanya kondisi sumberdaya yang terbatas sehingga menjadi bahan rebutan yang menyebabkan konflik (Wallace and Wolf, 2005).

Penelitian tentang konflik di Kota Cirebon, khususnya di Kelurahan Lemahwungkuk sering terjadi konflik baik antar nelayan maupun antar kelompok diluar nelayan serta konfliknya berulang. Secara geografis, lokasi ini berada pada jalur utama atau jalan nasional yang merupakan Jalur Pantai Utara yang menjadi daerah lintasan menuju Jakarta dan arah timur ke Jawa Tengah, Jogjakarta serta Jawa Timur serta berada di daerah pusat pertumbuhan kota Jawa Barat bagian utara, sehingga ketika konflik terjadi, maka peristiwa konflik tersebut akan menjadi isu nasional manakala tidak segera ditangani dengan baik.

Beberapa penelitian yang terkait dengan konflik pada masyarakat nelayan. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2008) dengan judul Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura dalam Perspektif Sosiologis-Hukum. Dalam penelitiannya, Hikmah (2008) menjelaskan tipe dan karakteristik konflik kenelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan Selat Madura Propinsi Jawa Timur pra-pasca otonomi daerah, mengidentifikasi pihak-pihak dalam konflik dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik, menelusuri sebab-sebab permasalahan konflik serta menjelaskan penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) tipologi konflik kenelayan yaitu konflik kepemilikan sumberdaya, konflik pengelolaan sumberdaya, konflik cara produksi/ alat tangkap, konflik lingkungan, konflik usaha dan konflik primordial. Konflik cenderung terbuka dan bernuansa kekerasan seperti pada kasus konflik antara nelayan Batah, Kecamatan Kwanyar dengan nelayan-nelayan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan. Isu utama yang menjadi akar permasalahan konflik adalah berkaitan dengan isu keterbatasan sumberdaya perikanan Selat Madura yang telah *overfishing*. Pihak-pihak dalam konflik yaitu komunitas nelayan (kelompok nelayan Batah dan nelayan luar), Diskanla Kabupaten Bangkalan, Muspika Kwanyar, Polsek Kwanyar, Koramil Kwanyar, Aparat Kamla, Tokoh Masyarakat, Tokoh Nelayan dan Penyuluh Lapang. Manajemen konflik dilakukan secara alternatif (*alternative dispute resolution*) dan *adjudikasi*. Penyelesaian (*resolusi*) alternatif ditujukan untuk menghasilkan suatu kesepakatan atau konsensus, sedangkan *adjudikasi* secara *litigasi* efektif untuk meredam tindakan-tindakan yang cenderung melanggar hukum,

seperti pelanggaran aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya serta akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumberdaya. Upaya pencegahan konflik (*resolving*) yang telah dan masih dilakukan seperti sosialisasi hukum dan perundangan perikanan kepada masyarakat nelayan, patroli aparat Kamla (Keamanan Laut) dalam hal pengawasan dan penegakan hukum perikanan, serta pengaturan penggunaan alat tangkap Minitrawl.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang berjudul Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Wijaya, Rohmah & Ismani: 2009). Penelitian ini membahas penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu serta cara penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu masih beroperasinya alat tangkap trawl (jaring pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Kedua, adanya pelanggaran jalur penangkapan. Ketiga perbedaan teknologi penangkapan. Keempat, kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah dan terakhir yaitu belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan.

Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu ini dapat diselesaikan melalui beberapa upaya. Upaya pertama, yaitu kapal-kapal trawl dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nelayan tradisional (0-3 mil laut), jika memang tetap beroperasi, nelayan tradisional menghendaki adanya kontribusi kepada para nelayan tradisional berupa 5 % dari hasil tangkapan nelayan modern. Kedua, yaitu penetapan jalur penangkapan yang jelas bagi nelayan tradisional

dan bagi nelayan modern, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran jalur penangkapan. Ketiga, sikap tegas dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu terhadap segala macam pelanggaran yang terjadi dan terakhir yaitu upaya menjalin kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan konflik pada masyarakat nelayan yaitu penelitian yang berjudul Konflik Kelas Nelayan Tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan Nelayan Semi Modern (Maulana: 2016). Penelitian ini membahas tentang proses terjadi konflik antara nelayan tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan nelayan jaring kurau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kelas yang terjadi antara nelayan tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan nelayan jaring kurau (Kecamatan Durai) disebabkan adanya perbedaan pandangan/kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Seperti klaim terhadap jalur-jalur tangkapan dan cara penangkapan/teknologi tangkapan. Isu yang terjadi dalam konflik kelas ini adalah faktor ekonomi yakni adanya ketimpangan pendapatan yang berimplikasi pada kesenjangan ekonomi bagi nelayan tradisional Kampung Benteng. Hal ini terjadi karena kecemburuan sosial terhadap nelayan jaring kurau karena memperoleh bagian terbesar dari eksploitasi sumberdaya perikanan. Eksploitasi sumberdaya oleh nelayan jaring kurau telah mengakibatkan kelangkaan sumberdaya perikanan di wilayah Kecamatan Moro, sehingga terganggunya mata pencaharian atau sumber hidup di kalangan nelayan tradisional. Isu ini termasuk dalam *realistic issue*, yaitu isu yang menyangkut sumber hidup atau masalah perut sehingga konflik yang terjadi cukup brutal yaitu dengan adanya pembakaran kapal dan pemukulan nakhoda kapal jaring kurau ketika konflik berlangsung.

Dalam hal hukum dan aturan jalur tangkap yang mengatur pembagian batas wilayah tangkap antara nelayan tradisional dan nelayan jaring kurau tidak berjalan sebagai mana mestinya karena aparat penegak hukum (Pol Airud dan TNI-AL) tidak melakukan kontrol atas batas-batas tangkap di perairan Kecamatan Moro. Nelayan tradisional Kampung Benteng hampir keseluruhan mengalami tingkat kesadaran kelas yang rendah, sehingga tidak lagi menganggap aktifitas nelayan jaring kurau sebagai faktor masalah atau “masalah bersama”.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, secara khusus dalam penelitian ini akan dikaji lebih jauh mengenai konflik pada masyarakat di pesisir pantai utara Jawa Barat, tepatnya di Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak konflik dan resolusi konflik di lokasi tersebut. Kemudian, Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: (1) memperoleh data dan informasi berkenaan dengan konflik dan resolusi konflik pada masyarakat nelayan dan antar nelayan pada masyarakat nelayan; (2) Memberikan rekomendasi dalam resolusi konflik nelayan bagi kelembagaan nelayan dan pemerintah daerah; (3) Memberikan kontribusi keilmuan dalam memandang konflik sebagai dinamika sosial.

Pada akhirnya, hasil penelitian ini dapat memetakan masalah konflik yang terjadi di daerah nelayan di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa Barat berdasarkan peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak konflik, dan resolusi konflik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dalam upaya mendeskripsikan fenomena konflik sosial antar kelompok masyarakat dan antar nelayan

di di Kelurahan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Pendekatan ini digunakan dalam upaya menggali secara mendalam fenomena konflik sosial antara masyarakat dan antar nelayan, yang berkaitan dengan aspek pemicu, penyebab, dan dampak serta resolusi konfliknya. Studi kasus dipilih untuk menggali pengalaman para pelaku konflik sosial. Pelaku konflik sosial yang dimaksud, yaitu seseorang yang terlibat langsung di dalam konflik. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball*. Peneliti memperoleh informasi keberadaan informan pertama dari aparat kelurahan, dan dari informan pertama tersebut diperoleh informan kedua dan seterusnya hingga berjumlah 29 orang.

Penelitian ini dilakukan bulan Agustus-Oktober tahun 2016. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan di Kelurahan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat dan nelayan.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi

Secara geografis, lokasi ini berada pada jalur utama atau jalan nasional yang merupakan Jalur Pantai Utara yang menjadi daerah lintasan. Menuju arah barat ke Jakarta, dan arah Timur ke kota kabupaten Jawa Tengah, Yogyakarta serta Jawa Timur. Posisi lokasi ini yang menyebabkan konflik sosial yang terjadi menjadi isu nasional.

Dilihat dari kondisi geografi maupun demografi, Kelurahan Lemahwungkuk, merupakan salah satu kelurahan yang termasuk kampung nelayan di Kota Cirebon. Di Kelurahan Lemahwungkuk ini seringkali mengalami beragam jenis konflik sosial, baik dalam jangka waktu pendek maupun konflik yang berkepanjangan. Konflik yang seringkali terjadi seperti konflik antar kelompok masyarakat

dan antar nelayan, pemuda, penduduk pendatang, maupun konflik antara masyarakat dengan pemerintahan setempat.

Di Kelurahan Lemahwungkuk terdapat kampung yang sering berkonflik, yaitu Kampung Cangkol dan Kampung Kesunean. Kedua kampung ini merupakan kampung yang paling sering berkonflik dengan skala besar dan jangka panjang. Beberapa kali sebagian besar warga di Kampung Cangkol terlibat tawuran dengan warga di Kampung Kesunean.

2. Konflik di Kampung Nelayan

Di Kelurahan Lemahwungkuk, terdapat 4 (empat) kelompok yang terlibat langsung konflik sosial, yaitu (1) perkelahian antar pemuda, (2) konflik antar warga masyarakat dengan daerah yang berbeda, (3) konflik antar nelayan, dan (4) konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Konflik atau perkelahian antar pemuda seringkali terjadi antara pemuda Kampung Cangkol dengan Kampung Kesunean, Kelurahan Lemahwungkuk. Konflik tersebut terjadi karena pemicu atau penyebab seperti mabuk-mabukkan, permasalahan asmara, maupun konflik antar geng motor. Perkelahian antar pemuda merupakan salah satu konflik yang seringkali berlangsung dalam waktu yang lama dan menimbulkan korban jiwa.

Konflik antar kelompok nelayan merupakan konflik yang sering terjadi di Kampung Cangkol Tengah. Konflik ini berskala relatif kecil dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh seorang nelayan, bahwa beberapa nelayan pernah terancam keselamatan jiwa, seperti percobaan pembunuhan. Penyebab konflik, yaitu ketidaksepahaman atau dendam di antara nelayan, terkait dengan pemakaian pukot harimau. Sebagaimana dituturkan oleh nelayan

di Kampung Cangkol Utara, bahwa ada larangan pemakaian alat tangkap “pukat harimau”. Oleh karena tidak ada batas wilayah penangkapan ikan, maka beberapa nelayan dari Kabupaten Cirebon maupun luar Pulau Jawa, seringkali menangkap ikan dengan memakai alat tangkap “pukat harimau” tersebut. Hal ini memacu emosi di antara nelayan, hingga akhirnya menimbulkan konflik di antara keduanya. Namun, konflik yang terjadi di antara nelayan dapat tertangani dengan segera atas bantuan perlindungan dari Polisi Air, Dinas Kelautan, dan Ketua Organisasi Nelayan setempat.

Konflik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum/pemerintah terjadi ketika masyarakat mulai menaruh ketidakpercayaan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Masyarakat mulai kurang percaya kepada pejabat di lingkungan Dinas Kelautan. Dinas Kelautan yang selama ini dipercaya membantu nelayan, dijabat oleh seorang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu, nelayan lebih sering mengadukan permasalahan ke Kepolisian Air atau ke pengurus organisasi nelayan. Bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan terjadi pada tahun lalu. Di mana Lurah diturunkan dari jabatannya karena dicurigai melakukan penyimpangan. Dampaknya, masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

3. Pemicu Konflik

Pemicu konflik yang paling dominan pada masyarakat nelayanyaitu karena persoalan sepele. Berdasarkan informasi yang didapat konflik yang terjadi karena masalah sepele lebih banyak dilakukan oleh kaum muda. Masalah – masalah yang dianggap sepele yaitu masalah percintaan anak muda, mabuk – mabukan, hingga ulah geng motor.

Adapun kejadian yang dianggap sebagai persoalan sepele pada masyarakat nelayan dan

antar nelayan di Kelurahan Lemahwungkuk diantaranya adalah masalah percemburuan antar pasangan; mabuk-mabukan yang seringkali secara tidak sadar menimbulkan perkelahian; maupun ulah geng motor dengan menggunakan suara knalpot berisik yang mengganggu ketenangan warga sekitar sehingga menimbulkan perkelahian.

Sedangkan, pemicu konflik yang paling dominan antar nelayan pun karena persoalan sepelebiasanya sering terjadi misalnya saat kapal mereka saling bertubrukan dilaut hingga menyebabkan terjadinya adu mulut bahkan perkelahian. Namun permasalahan yang terjadi biasanya hanya berakhir dilaut saja sehingga tidak berkepanjangan di daerah darat. Adapun permasalahan yang pemicunya hal sepele namun sangat berdampak besar contohnya permasalahan antar nelayan ketika nelayan kota dengan kabupaten berselisih tentang persoalan alat tangkap ikan. Perselisihan itu pernah terjadi hingga menyebabkan adanya korban jiwa.

Namun, kejadian dalam konflik antar nelayan yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa tidak berjumlah banyak. Kejadian ini hanya berlangsung beberapa kali saja oleh karena aksi cepat tanggap yang dijalankan oleh ketua organisasi nelayan dan polisi air setempat. Sedangkan pemicu konflik lainnya seperti isunya tidak jelas dan adanya provokator tidak dominan, artinya ada namun tidak begitu besar pengaruhnya.

4. Penyebab Konflik

Penyebab konflik masyarakat nelayan yaitu adanya ketidakadilan dan perebutan/persaingan sumber daya ekonomi. Perebutan/persaingan sumber daya ekonomi ini terkait dengan persaingan dagang antar warga masyarakat, seperti antara sesama tukang becak, supir angkot, ataupun sesama pedagang asongan dan warung kaki lima. Namun, konflik yang

terjadi berlangsung dalam waktu singkat dan tidak sampai menimbulkan korban luka/jiwa. Selain itu, bagi nelayan, persaingan dalam hal ekonomi akan terkait dengan pemakaian pukat harimau. Hal ini dikemukakan sebagai bentuk persaingan ekonomi karena nelayan yang memakai pukat harimau akan memberikan dampak pada kematian ikan dan biota laut lainnya yang hidup di perairan dimana nelayan setempat bekerja.

Sedangkan, penyebab konflik lainnya adalah ketidakadilan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup (sumber daya air bersih dan keberlangsungan kegiatan kelautan dan perikanan para nelayan lokal setempat). Hal ini dinilai oleh nelayan dalam beberapa segi aspek masalah, diantaranya adalah ketidakberdayaan nelayan untuk melarang pemakaian pukat harimau kepada nelayan dari wilayah lain yang sedang menangkap ikan di wilayahnya. Pelarangan akan pemakaian pukat harimau oleh nelayan setempat dinilai sebagai usaha sepihak saja. Hal ini ditanggapi oleh mayoritas masyarakat nelayan bahwa pemerintah memberikan peraturan yang belum optimal atau hanya dijalankan secara setengah-setengah. Misalnya, peraturan pelarangan pemakaian pukat harimau, namun belum ada pemantauan secara langsung terhadap pelanggar peraturan, akibatnya banyak konflik yang terjadi oleh karena kesalahpahaman satu sama lain antar nelayan yang saling menegur pemakaian pukat harimau. Selain itu, ketidakadilan dinilai oleh masyarakat nelayan karena adanya pergantian jabatan pemerintahan di Dinas Kelautan oleh pihak yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Hal ini dinilai sebagai sebuah ketidakadilan oleh karena masyarakat nelayan menginginkan posisi yang diduduki tersebut ditempati oleh ahli dalam bidang kelautan dan perikanan sebagaimana yang mereka harapkan untuk terlaksananya pengawasan

maupun sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada nelayan setempat. Namun, oleh karena berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kelautan, maka sebagian besar nelayan mulai berkurang tingkat keterlibatannya dalam program yang diadakan oleh Dinas Kelautan untuk nelayan setempat seperti misalnya dalam rangka sosialisasi bidang kelautan.

Selain itu, konflik yang terjadi disebabkan adanya ketiadaan batas wilayah. Masyarakat nelayan mengemukakan bahwa tidak ada batas wilayah penangkapan ikan antara nelayan yang satu dengan nelayan dari wilayah lainnya. Bahkan, beberapa kali nelayan dari Kota Cirebon dapat bertemu dengan nelayan dari Kalimantan dan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. Namun, ketiadaan batas wilayah justru seringkali menimbulkan konflik antar nelayan dari daerah yang berbeda oleh karena persaingan sumber daya ekonomi dan tata aturan dalam pemakaian pukat harimau yang seringkali dilanggar oleh nelayan dari daerah lain diluar Kota Cirebon.

5. Dampak Konflik

Berdasarkan hasil Penelitian, terdapat enam hal yang menjadi dominan dalam dampak konflik pada masyarakat nelayan yaitu menimbulkan kerusakan lingkungan seperti halnya merusak biota laut dan sumber daya air bersih di sekitar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) maupun daerah masyarakat nelayan pada umumnya, kerusakan bangunan seperti halnya kaca-kaca rumah warga yang rusak karena dilempari batu dan alat tajam lainnya ketika terjadi perkelahian antar pemuda, perpecahan antar anggota masyarakat, berkurangnya kepercayaan dari anggota masyarakat terhadap pemerintah setempat dan konflik yang terjadi menimbulkan adanya perubahan nilai budaya.

Dampak konflik yang paling dominan yaitu adanya korban jiwa, baiknya luka ringan atau berat bahkan kehilangan nyawa. Sempat terjadi peristiwa perkelahian antara masyarakat daerah cangkol dengan kasunean dengan keterlibatan semua usia dikalangan masyarakat cangkol dan kasunean terlibat. Adapun, dampak konflik bagi nelayan dalam konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan yang terjadi di wilayah Kelurahan Lemahwungkuk tersebut yaitu gangguan atau hambatan dalam aktivitas mencari ikan dan adanya perubahan nilai budaya masyarakat nelayan dan penurunan permintaan penjualan ikan.

Dampak gangguan atau hambatan dalam aktifitas mencari ikan biasanya dipicu oleh permasalahan alat tangkap ikan. Hal ini disebabkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dinilai akan merusak habitat laut dan secara otomatis akan merugikan nelayan cangkol yang sudah menerapkan alat tangkapan ramah lingkungan.

Dampak hambatan dalam modal kerja ketika terjadi konflik antara masyarakat nelayan dan pemerintah. Pemerintah saat ini dinilai kurang tanggap dalam menangani masalah kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan oleh masyarakat nelayan, bahwa beberapa kali masyarakat nelayan mengajukan proposal terkait permohonan bantuan. Namun proposal tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah /Dinas Kelautan. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menyampaikan kebutuhan yang mereka perlukan dari pemerintah.

6. Resolusi Konflik

Dalam hal resolusi konflik pada masyarakat nelayan, setiap kali ada konflik maka langsung dilaporkan kepada pihak berwenang setempat agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat (menimbulkan korban luka/jiwa) seperti halnya pada konflik antar pemuda,

konflik antar pendatang, maupun ketika terjadinya konflik antar nelayan. Pihak yang sering dilibatkan dalam penanganan konflik adalah ketua RT/RW, tokoh agama, kelurahan, Polisi Air, Dinas Kelautan, dan pihak keamanan dan ketahanan daerah. Penyelesaian konflik yang dilakukan adalah melalui pelibatan tokoh agama. Melalui tokoh agama ini, diharapkan akan mencegah terjadinya konflik (terutama antar pemuda). Para pemuda dibina melalui pengajian bersama, disertai dengan ceramah untuk pengembangan diri yang positif.

Selama ini penyelesaian konflik hanya menekankan pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan konflik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penanganan konflik yang efektif guna tidak melibatkan banyak pihak, dan hanya berfokus untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berkonflik. Selain itu, pendekatan tradisional masyarakat lokal melalui jalan musyawarah. Pihak yang berkonflik seringkali dikumpulkan untuk kemudian dimusyawarahkan terkait dengan penanganan konfliknya. Hal ini dinilai sebagai bentuk nilai sosial budaya masyarakat untuk menyelesaikan konflik supaya tidak berkepanjangan. Pada peristiwa konflik kekerasan, pihak keamanan dan warga masyarakat berperan besar dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan konflik tersebut telah mengakibatkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa.

Perkelahian antar pemuda lebih banyak ditangani oleh tokoh masyarakat, pihak keamanan dan ketahanan daerah, dan anggota masyarakat (pelaku/korban). Tokoh masyarakat dalam hal ini biasanya bertindak sebagai orang yang menengahi sedangkan pihak keamanan dan ketahanan daerah sebagai pihak yang menertibkan, dan anggota masyarakat dalam hal ini pelaku/korban merupakan pihak yang memberikan keterangan serta menentukan

jalan keluar dari penyelesaian masalah dengan didampingi pihak-pihak terlibat yang lain seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak keamanan.

Pasca konflik lebih dominan ditangani oleh masyarakat lokal dan pihak keamanan dan ketahanan Daerah. Hal yang dilakukan pihak keamanan dalam menangani kejadian pasca konflik yaitu dengan memberi arahan kepada masyarakat nelayan agar tidak mudah terpengaruh pada hal – hal yang yang menimbulkan terjadinya konflik.

Namun, upaya pasca konflik antar pemuda hanya dilakukan berupa sosialisasi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab dan dampak konflik, sedangkan upaya rehabilitasi secara khusus bagi pelaku konflik dijalankan terpisah oleh Lembaga Pemasarakatan Anak di Kota Bandung. Begitupun dengan korban konflik tidak mendapatkan rehabilitasi kesehatan secara khusus, namun hanya berupa pengawasan dan sosialisasi akan dampak negatif dari konflik tersebut. Rehabilitasi yang dijalankan hanya berupa perbaikan kondisi masyarakat melalui kegiatan sosial yang dijalankan oleh tokoh masyarakat setempat guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya kembali seperti diadakan pengajian rutin bersama atau kegiatan gotong-royong yang dapat mempererat kembali tali silaturahmi antar warga.

Penanganan konflik yang dijalankan oleh masyarakat umum Lemahwungkuk dilaksanakan dengan jalan negosiasi dan mediasi. Hal ini dinilai sebagai bagian dari kerukunan kehidupan bermasyarakat. Negosiasi oleh karena konflik yang terjadi seringkali berlangsung dalam waktu yang singkat dan bersifat ringan. Konflik yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan berdampak negatif luas seringkali diselesaikan dengan jalan mediasi

seperti konflik antar pemuda yang melibatkan tawuran antar kampung yang berlangsung dalam waktu lama dan sukar untuk diselesaikan dengan jalan damai.

Sementara, Dalam hal resolusi konflik antar nelayan dilakukan dengan melibatkan pihak keamanan dan ketahanan daerah, pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Kelautan dan Polisi Air, dan pihak Asosiasi/ Perkumpulan Nelayan Daerah. Penyelesaian konflik menekankan pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan konflik oleh pemerintah setempat kepada masyarakat nelayan seperti sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan terkait dengan pencegahan atau penanganan konflik. Pihak yang sering dilibatkan dalam penanganan konflik nelayan adalah tokoh agama, polisi air, Dinas Kelautan, dan pihak keamanan dan ketahanan daerah. Keterlibatan pihak tertentu dalam penanganan konflik dilakukan bila konflik berpotensi untuk menimbulkan korban luka/jiwa dan kerusakan lingkungan.

Para nelayan memiliki keterikatan yang kuat di dalam ikatan organisasi nelayan. Oleh karena itu, setiap kali ada permasalahan antar nelayan, pertama kali yang dilakukan adalah melaporkan konflik tersebut kepada ketua organisasi nelayan. Ketua organisasi tersebut berusaha untuk mencari penyelesaian bersama. Apabila konflik sudah membesar dan menimbulkan korban luka atau korban jiwa, maka pihak yang berkonflik beserta ketua organisasi nelayan akan melaporkan kepada pihak Kepolisian Air dan Dinas Kelautan. Pengrus RT/RW dan aparat kelurahan oleh para nelayan dinilai sebagai pihak yang tidak perlu terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Penanganan pasca konflik seringkali dilakukan oleh Kepolisian Air dan Dinas Kelautan. Penanganan yang biasanya dilakukan adalah pemberian penyuluhan dan sosialisasi

terkait dengan konflik yang terjadi, maupun pengawasan yang dijalankan oleh Polisi Air setiap satu bulan sekali untuk mengawasi kinerja dan efektivitas aktivitas kelautan dan perikanan nelayan setempat. Konflik yang terjadi di area kelautan dan perikanan tidak akan menjadi sebuah masalah besar karena pihak Polisi Air akan dengan cepat tanggap membantu nelayan setempat yang berkonflik.

Dalam pasca konflik antar nelayan, pihak yang paling dominan terlibat adalah anggota masyarakat bersama tokoh nelayan yang ada di daerahnya. Biasanya masalah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh nelayan dan anggota masyarakat. Namun, untuk masalah yang sifatnya melanggar hukum seperti jatuhnya korban jiwa barulah penegak hukum terlibat didalamnya, termasuk tindakan cepat tanggap dari Polisi Air dan Pihak Dinas Kelautan yang berperan mulai dari saat konflik berlangsung, penyelesaian, hingga upaya rehabilitasi terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat setempat. Dalam hal ini, penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan jarang dilakukan oleh karena nelayan Lemahwungkuk sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan. Bila pun ada jalur pengadilan, maka konflik tersebut sudah dikategorisasikan sebagai konflik berat yang memakan korban jiwa.

Sama halnya dengan konflik yang terjadi pada masyarakat umum, maka masyarakat nelayan pun mendapatkan sosialisasi setelah konflik berlangsung guna mencairkan kembali suasana yg kondusif melalui kegiatan sosial antar nelayan usai terjadinya konflik. Polisi Air dan Dinas Kelautan merupakan pihak dari pemerintah dan keamanan dan ketahanan daerah yang paling sering terlibat dalam upaya rehabilitasi korban/pelaku konflik. Rehabilitasi konflik yang dilakukan hanya bagi konflik yang berlangsung dalam jangka waktu lama

dan memberikan dampak negatif yang besar, seperti halnya masalah penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini seringkali menyebabkan korban luka, bahkan korban jiwa bila korban konflik tidak segera melaporkan kejadian ini kepada pihak ketua organisasi nelayan untuk dilaporkan ke Polisi Air dan Dinas Kelautan. Namun, upaya rehabilitasi tetap dilakukan oleh Polisi Air setiap sebulan sekali dan Dinas Kelautan setiap 3 bulan sekali.

Adapun konflik yang terjadi pada nelayan seringkali ditangani dengan jalan negosiasi untuk kategori konflik yang bersifat ringan dan dikarenakan oleh masalah sepele, seperti tubrukan perahu di laut. Oleh karena itu, penanganan dengan jalan negosiasi dinilai tepat karena lebih mengusung sifat kekeluargaan yang erat antar nelayan, terlebih bila ada ikatan saudara dari perkawinan antar keluarga nelayan. Masyarakat nelayan memandang bahwa jika ada masalah yang terjadi di laut, maka harus diselesaikan di laut diantara kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak sampai masalah tersebut dibawa ke wilayah darat. Hal inilah yang dijadikan prinsip dalam menjalankan mata pencahariannya sehari-hari bagi nelayan.

PEMBAHASAN

Analisis tentang peristiwa konflik, penelitian ini menemukan bahwa pada masyarakat nelayan terdapat dua kategori konflik yaitu (1) konflik antar kelompok diluar nelayan yaitu perkelahian antar pemuda, konflik antar warga masyarakat dengan daerah yang berbeda, dan konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan (2) konflik antar kelompok nelayan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Garna Garna (1996) khususnya dalam relasi kelompok, konflik terjadi antara kelompok dengan kelompok. Namun, temuan

kategori konflik pada masyarakat nelayan ini berbeda dengan penelitian yang memfokuskan pada kategori kelompok tertentu seperti yang dilakukan oleh Hikmah (2008) memfokuskan konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya, Wijaya, Rohmah dan Ismani (2009), membahas konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern, Rudyanto (2014) mengkaji konflik nelayan tradisional dengan nelayan pukat *trawl*, (Maulana: 2016) melakukan studi tentang konflik kelas nelayan tradisional dan nelayan semi modern.

Analisis pemicu konflik pada masyarakat nelayan, penelitian ini menemukan, bahwa pemicu konflik baik pada masyarakat nelayan dan antar nelayan bersifat sepele dan tidak rasional. Pemicu konflik antar kelompok diluar nelayan pada masyarakat diakibatkan oleh masalah percemburuan antar pasangan, mabuk-mabukan dan suara knalpot. Sementara, pemicu konflik antar nelayan adalah tubrukan antar perahu yang diikuti dengan adu mulut. Penelitian lain menemukan informasi yang sama, bahwa pemicu konflik bersifat sepele, yaitu Nulhaqim (2007) dikarenakan suara tiang listrik, saling ledek, suara terikan ada penyerangan, dll. Berbeda dari hasil temuan Menurut Pasaribu (2013:473) terdapat dua faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, yaitu: persaingan (*competition*) dan kontravensi (*contravention*). Pemicu merupakan penyebab langsung dari adanya konflik, sementara penyebab adalah kondisi yang menyebabkan tidak langsung terjadinya konflik sosial. Pada penelitian ini, peristiwa konflik sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik disebut pemicu, sementara kondisi yang menyebabkan tidak langsung dan dapat dikategorikan akar yang menyebabkan konflik disebut penyebab konflik sosial.

Analisis penyebab konflik pada masyarakat nelayan dalam penelitian ini menemukan bahwa

penyebab konflik penyebab konflik yang utama yaitu adanya ketidakadilan dan perebutan/persaingan sumber daya ekonomi. Bagi nelayan, persaingan dalam hal ekonomi ini terkait dengan pemakaian pukat harimau sebagai alat tangkap ikan yang telah dilarang penggunaannya. Bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ini hasil tangkapan mereka memang lebih banyak, dibandingkan hasil nelayan lain yang telah menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan aturan. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam hal perebutan/persaingan sumber daya ekonomi. Penelitian lain yang juga menemukan hal yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Rohmah & Ismani (2009). Berdasarkan penelitian ini penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu salah satunya yaitu masih beroperasinya alat tangkap *trawl* (jaring pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Namun Berbeda dengan penyebab konflik dari pandangan Narwoko dan Suyanto (2005) penyebab terjadinya konflik yaitu Perbedaan pendirian dan keyakinan, kebudayaan, dan kepentingan. Sementara, Menurut Soekanto (2001) dan Tajudin (2000) menjelaskan bahwa penyebab konflik adalah perbedaan. Temuan hasil penelitian ini memberikan khasanah pengayaan dalam menjelaskan tentang penyebab konflik yaitu adanya ketidakadilan dan perebutan sumber daya ekonomi. Jika dilihat lagi lebih mendalam yang menjadi penyebab konflik adalah ketidakadilan yang terjadi termasuk dildalamnya dari segi ekonomi. Perebutan sumber daya ekonomi pada masyarakat nelayan namun idasari oleh keadilan, maka kecenderungannya tidak akan mengakibatkan terjadinya konflik pada masyarakat nelayan.

Analisis dampak konflik berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konflik yang

terjadi di Desa Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon menimbulkan beberapa dampak diantaranya yaitu adanya korban luka dan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan bangunan, maupun terjadinya perpecahan antar anggota masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ahmadi (2007) yang menyatakan bahwa salah satu dampak konflik yaitu berupa dampak destruktif retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia dan berubahnya sikap dan kepribadian individu baik yang mengarah ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif, dampak lainnya adalah konstruktif yaitu bertambahnya solidaritas kelompok dan pribadi-pribadi yang tahan uji serta kompromi baru. Sementara Setiadi dan Kolip (2011) mengemukakan konflik memiliki dampak negatif dan Narwoko dan Suyanto (2005), berpandangan bahwa konflik memiliki dampak positif. Dengan demikian, hasil Penelitian tentang konflik masyarakat nelayan mengangkat dari sisi negatif dari konflik, namun sisi positifnya tidak menjadi fokus kajian.

Analisis resolusi konflik, Temuan penelitian adalah Resolusi konflik masyarakat nelayan di Kelurahan Lemahwungkuk ditangani melalui pendekatan keamanan, negosiasi dan mediasi. Pendekatan keamanan dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat kedua kelompok sudah mulai berhadap-hadapan serta pasca konflik dengan diberikan pengarahan agar tidak terjadi konflik kembali, sedangkan negosiasi dilakukan pada oleh para tokoh dari kedua kelompok yang berkonflik serta mediasi dilakukan oleh aparat pemerintahan dan keamanan. Nasikun (2003) mengenai bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari

penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal. Kemudian, Nulhaqim (2007), Resolusi konflik dalam perkelahian antar warga melalui manajemen kolaborasi resolusi konflik dengan keterlibatan berbagai stakeholder serta resolusi dengan litigasi dan non litigasi yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi. Berkenaan hal tersebut, resolusi konflik pada masyarakat nelayan yaitu pendekatan keamanan, negosiasi dan mediasi. Resolusi konflik berupa konsiliasi dan arbitrase serta litigasi belum menjadi pilihan sebagai resolusi konflik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa konflik sosial di kampung nelayan, ada faktor pemicu dan penyebab. Pemicu konflik antar kelompok masyarakat dan antar nelayan memiliki kesamaan, yaitu dipicu oleh perbuatan yang sepele seperti suara knalpot motor, rasa cemburu, dan gesekan antar perahu. Begitupun dengan penyebab konflik, adalah perlakuan yang tidak adil dan persaingan sumber daya ekonomi.

Konflik sosial menimbulkan akibat, yaitu adanya korban luka dan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan bangunan, maupun terjadinya perpecahan antar anggota masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan:

1. Resolusi konflik antar kelompok masyarakat dan antar nelayan akan efektif dengan mengkaji terlebih dahulu pemicu, penyebab, dan dampak negatif dari konflik tersebut. Diperlukan asesmen secara mendalam mengenai aspek-aspek tersebut.

2. Pendekatan dalam resolusi konflik, yaitu keamanan, negosiasi, dan mediasi. Aparat keamanan berperan dalam pendekatan keamanan, baik di darat maupun dilaut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik maupun pada saat terjadinya konflik. Pada pendekatan ini tetap mengedepankan nilai keadilan dan perhatian yang kuat pada daerah yang memiliki sumber ekonomi yang sering diperebutkan. Tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan negosiasi dan pemahaman konflik yang terjadi, baik dari peristiwa, pemicu, penyebab, dampaknya sehingga konflik pada masyarakat nelayan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkepanjangan. Tokoh formal meliputi Lurah/Kepala Desa/Camat/Kapolsek/Danramil dan instansi di atasnya serta aparaturnya perlu memiliki kemampuan mediasi dan pemahaman konflik dan dimensinya yaitu peristiwa konflik, pemicu, penyebab, dampaknya serta bentuk-bentuk resolusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan.
3. Pemberdayaan nelayan dan institusi nelayan merupakan aspek penting dalam melakukan resolusi konflik antar nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada editor dan mitra bestari, yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan artikel ini. Kepada pengelola sosio konsep, yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel kami. Kemudian, kepada rekan dosen di lingkungan FISIP Unpad yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi untuk mendalami hasil penelitian yang ditulsi ke dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu, 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Garna, Yudistira K. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: PPs Unpad.
- Hikmah, Zainatul. 2008. *Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Dalam Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur)*. Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Maulana, Raden Istawa. 2016. *Konflik Kelas Nelayan Tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro Dan Nelayan Semi Modern*. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nulhaqim, Soni A, dkk. 2013. *Model Penanganan Konflik Antar Warga Di Jawa Barat*. Dibiayai oleh: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2007. *Manajemen Kolaborasi Resolusi Konflik dalam Perkelahian antar warga di Daerah Perkotaan Studi Kasus: Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur*. Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Pasaribu, Rowland B. F. 2013. *Konflik Sosial*. Universitas Gorontalo.
- Rudyanto. 2014. *Pemetaan Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Pukat Trawl Menggunakan Model Sipabio (Source, Issues, Parties, Attitude, Behaviour; Intervention, Output)* (Kajian Pada Konflik Masyarakat Nelayan di Desa Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan Tahun 2011-2013). Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tadjudin, Djuhendi, 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: LATIN
- Wallace and Wolf .2005. *Contemporary Sociological Theory*. Prentice Hall Upper Sadle River. New Yersey.
- Wijaya, Antony, Siti Rochmah dan Ismani. 2009. *Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional Di Kelurahan Pasar Bengkulu Dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu)*. Jurnal Wacana Vol. 12 No. 2 April 2009 ISSN. 1411-0199.